

PARADIGMA MADZHAB-MADZHAB EKONOMI ISLAM DALAM MERESPON SISTEM EKONOMI KONVENSIONAL

Fadllan

(Jurusan Syari'ah STAIN Pamekasan, Jl. Raya Panglegur Km. 04 Pamekasan, email: fadlanelhanif@gmail.com)

Abstrak:

Sistem Ekonomi Islam berangkat dari kesadaran tentang etika, sebuah *ethical economy*, sedangkan sistem ekonomi lain, baik kapitalisme maupun sosialisme, berangkat dari kepentingan (*interest*). Kapitalisme berangkat dari kepentingan perorangan (*selfishness*) dan sosialisme berangkat dari kepentingan kolektif (*collectivism*). Ekonomi Islam meletakkan hak individu dan masyarakat dalam neraca keseimbangan yang adil. Berkenaan dengan bagaimana konsep ekonomi Islam itu, terdapat tiga madzhab yang memiliki pandangan yang berbeda, yaitu: *Pertama*, madzhab Bagir al-Sadr yang memandang bahwa ilmu ekonomi (*economics*) tidak pernah bisa sejalan dengan Islam, karena keduanya berasal dari filosofi yang saling kontradiktif. Karenanya, madzhab ini menggunakan istilah *iqtishād*, bukan ekonomi Islam. *Kedua*, madzhab *Mainstream* yang berpandangan bahwa, sebagaimana ekonomi konvensional, kelangkaan sumber daya menjadi penyebab munculnya masalah ekonomi. *Ketiga*, madzhab Alternatif Kritis yang berpendapat bahwa analisis kritis bukan saja harus dilakukan terhadap sosialisme dan kapitalisme, tetapi juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri.

Abstract:

Economic system of Islam is based on the awareness of ethic, an ethical economy, while the others, both capitalism or socialism, are based on interest. Capitalism began from individual interest and socialism was from collective one. Islamic economy has individual right and society in the fair balance. In the case of Islam economy system, there are three sects having the different perspectives. *First*, *Bagir al-Sadr* sect thinks that economics cannot in the same way with Islam since both of them are from the contradictory philosophy.

Second, Mainstream sect thinks like conventional economy, the limited resource becomes the cause of economy problem appearance. *Third, Alternative Kritis* sect thinks that critics analysis is not only required to be done to socialism and capitalism but it is also to its islam economy itself.

Kata-kata kunci:

Ekonomi Islam, Kapitalisme, Sosialisme, Bagir al-Sadr, *Mainstream*, dan Alternatif Kritis

Pendahuluan

Pada saat masyarakat dan bangsa Indonesia, khususnya kaum Muslim, mengalami krisis dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya dalam bidang ekonomi, terdapat kesadaran transendental untuk mengembalikan persoalan ini pada ajaran Islam. Meskipun pada mulanya ajaran Islam dalam bidang ekonomi dianggap sebagai alternatif, akan tetapi secara bertahap dan mudah-mudahan meyakinkan, menjadi satu-satunya pilihan dan keniscayaan. Hal ini setelah disadari bersama bahwa baik sistem kapitalis individualistis yang dibangun dan dikembangkan oleh blok Barat, maupun sistem komunis sosialis yang dibangun oleh blok Timur, ternyata tidak mampu menjawab berbagai persoalan ekonomi dan tidak mampu pula memberikan solusi bagi setiap persoalan kemanusiaan yang terjadi. Namun yang terjadi malah sebaliknya, kerusakan dalam semua bidang kehidupan.

Banyak tokoh-tokoh yang mempersoalkan sistem ekonomi yang kini sedang menguasai dunia, salah satu di antaranya adalah M. Umer Chapra.¹ Sisi-sisi kelemahan dan kekurangan dari sistem

¹ M. Umer Chapra adalah ekonom kelahiran Pakistan. Mengajar di beberapa perguruan tinggi di Amerika Serikat. Alumni Universitas of Minnesota, Amerika Serikat ini telah mempublikasikan secara luas tulisan-tulisannya di bidang ekonomi dan keuangan Islam. Karya utamanya yang mendapat sambutan luas adalah *Towards a just Monetary System* yang diterbitkan Islamic Foundation (1985). Ia juga menerima sejumlah penghargaan, termasuk *Islamic Development Bank Award for Islamic Economics* dan *King Faysal International Award for Islamic Studies* yang prestisius, keduanya pada tahun 1989, dan *Institute of Overseas Pakistanis' Award for service to Islam* pada tahun 1995. Biografinya lebih lengkap lihat dalam bukunya, *The Future of Economic: An Islamic Perspective*, terj. Amdiar Amir, et.al, (Jakarta: Syariah Economic and Banking Institute, 2001), hlm. 473-474

ekonomi konvensional telah banyak diungkapkannya melalui tulisan-tulisan ilmiahnya seputar persoalan ekonomi. Paling tidak ada tiga sistem ekonomi konvensional yang menjadi obyek kritik ilmiahnya, yaitu, kapitalisme, sosialisme dan negara kesejahteraan (*welfare state*).

Kegagalan ekonomi konvensional inilah, menurut Chapra, menyebabkan munculnya upaya untuk mencari alternatif. Di sinilah ekonomi Islam dianggap berpotensi untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umum, yang merupakan dambaan semua orang.² Hal ini secara langsung membawa kita pada pertanyaan mengapa ekonomi konvensional gagal dan apa yang bisa membuat kita merasa yakin dengan masa depan Ekonomi Islam?

Berangkat dari pertanyaan tersebut tulisan ini menjadi penting, untuk mengulas tentang berbagai konsep yang berkaitan dengan sistem Ekonomi Islam disertai perbandingan dengan sistem ekonomi konvensional agar dapat menambah khazanah dan penguatan kesadaran untuk melakukan proses Islamisasi dalam berbagai aktivitas ekonomi.

Kapitalisme: Latar Belakang, Falsafah dan Prinsip-prinsipnya

Konsep Kapitalisme terutama dapat ditelusuri dari tulisan para ahli teori sosialis. Karya Sombart adalah konsep kapitalisme yang secara pasti diakui sebagai dasar bagi sistem pemikiran ekonomi. Konsep ini menunjukkan bahwa Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang secara jelas ditandai oleh berkuasanya *kapital*. Seperti sistem ekonomi lainnya, kapitalisme juga mengandung unsur pokok yang merupakan semangat atau pandangan ekonomi – jumlah dari keseluruhan tujuan, motif dan prinsip. Motif dan prinsip ini didominasi oleh tiga gagasan: perolehan, persaingan, dan rasionalitas.³

Jiwa peraturan kapitalisme terlihat jelas pada egoisme, bebas menumpuk harta kekayaan, mengembangkannya dan membelanjakannya. Pemikiran yang berorientasi kepada individualisme sama sekali tidak memperhatikan kepentingan orang lain kecuali kalau ada manfaat yang dipetikinya. Mereka tidak mementingkan kemaslahatan

² Ibid., hlm. xxiv

³ Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993), hlm. 311

orang lain jika itu bertentangan dengan kemaslahatan sendiri. Slogan mereka “bersaing dengan lawan” dan bertekad mengalahkannya.⁴

Tujuan kegiatan ekonomi dalam kapitalisme ialah perolehan menurut ukuran uang. Gagasan memperbanyak jumlah uang yang tersedia merupakan kebalikan dari gagasan memperoleh nafkah yang menguasai semua sistem prakapitalis, terutama ekonomi kerajinan tangan feodal. Sekalipun perolehan merupakan tujuan dari kegiatan ekonomi, namun sikap yang ditunjukkan dalam proses ini dapat dilukiskan sebagai kebebasan perolehan dari luar. Karena kebebasannya dari peraturan, kapitalisme pada hakikatnya bersandar pada keseluruhan individu akan kekuasaan alaminya. Karena itu kegiatan ekonomi ini berhubungan erat dengan resiko pribadi, tapi si pelaku ekonomi bebas untuk mengusahakan keberhasilan ekonomi dengan cara apa saja yang dipilihnya, asal saja tidak melanggar hukum pidana.

Sesungguhnya, kapitalisme seperti yang kita hadapi dewasa ini mendewakan uang atau kediktatoran dolar. Demikianlah G.G. Wells berkata: “Kapitalisme adalah sesuatu yang tidak dapat didefinisikan, tetapi pada umumnya kita menyebutnya sebagai sistem kapitalis, suatu kompleks kebiasaan tradisional, energi perolehan yang tidak terkendalikan, dan kesempatan jahat serta pemborosan hidup”.

Ada beberapa ciri-ciri kapitalisme yang menonjol, yaitu sebagai berikut :⁵

1. Tidak ada Perencanaan, yaitu tidak adanya suatu rencana ekonomi sentral merupakan salah satu ciri kapitalisme yang sangat menonjol. Para ahli ekonomi Kapitalis bersandar pada tindakan individu yang bebas (tapi saling tergantung) dari jutaan ekonomi pribadi. Dan tindakan ini tidak terkoordinasi oleh suatu rencana pusat. Harga pasar, tidak ditentukan oleh pemerintah tetapi oleh kekuatan pasar itu sendiri.
2. Kekuasaan Konsumen, yaitu tidak adanya suatu rencana ekonomi sentral mengandung arti adanya kekuasaan para konsumen dalam ekonomi kapitalis. Tetapi adanya kekuasaan konsumen ini justru membahayakan konsumen itu sendiri, karena mereka yang

⁴ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 69

⁵ Mannan, *Teori dan Praktik*, hlm. 312-315

- mewajibkan dan kekuasaan untuk berencan sangat dimungkinkan selalu tergoda untuk menggantikan keputusan mereka (yang dianggap superior) dengan keinginan para konsumen.
3. Kebebasan memilih pekerjaan. Hal ini selalu dianggap sebagai salah satu ciri terpenting kapitalis. Jadi kebebasan memilih pekerjaan ini mengandung arti bahwa untuk menarik suplai dari suatu jenis khusus tenaga kerja yang mencukupi pada suatu industri, dimana tenaga kerja ini menjadi sangat dibutuhkan, maka pemberian upah harus cukup tinggi agar mempunyai daya tarik.
 4. Kebebasan Berusaha, yaitu kebebasan dalam berusaha merupakan ciri lain dari kapitalis. Kebebasan usaha swasta ini merupakan adanya alat produksi material oleh swasta. Tanpa hak pemilikan ini tentunya hampir tidak mungkin ada suatu ekonomi yang tidak mungkin ada suatu ekonomi yang tidak terencana, yang mengandung arti kebebasan prakarsa individual, lembaga hak milik pribadi dianggap sebagai bagian dari sistem kapitalisme.
 5. Kebebasan Untuk Menabung dan Menginvestasi, yaitu dalam kapitalisme, hak untuk menabung didukung dan ditingkatkan oleh hak untuk mewariskan kekayaan. Karena itu kebebasan untuk menabung, mewarisi, dan untuk menumpuk kekayaan lebih merupakan ciri khas kapitalisme.
 6. Persaingan dan Monopoli, yaitu struktur ekonomi kapitalis adalah struktur bersaing. Hal tersebut merupakan suatu keharusan, karena jumlah persaingan yang cukup, sangat diperlukan bila seluruh proses produksi dan distribusi diatur oleh kekuatan pasar. Kapitalisme menyatakan bahwa persaingan dapat menyebabkan suatu proses seleksi alami dan dengannya setiap individu dapat mencapai tingkat dalam posisi yang paling mampu (tinggi) dan menyingkirkan lawan-lawan bisnisnya.

Kritik terhadap Kapitalisme

Menurut Halm ada empat serangan penting terhadap kapitalisme, yaitu:⁶

1. Serangan yang paling utama adalah bahwa distribusi kekayaan dan pendapatan yang tidak merata menyebabkan ketidakmerataan dalam kekuasaan ekonomi dan politik.

⁶ Ibid, hlm. 316

2. Kapitalisme sering dianggap kurang produktif dibandingkan dengan sistem kolektif yang dapat merencanakan pembangunan dengan cermat. Terutama, dikemukakan bahwa keuntungan tidak identik dengan produktifitas dan persaingan seringkali berlebihan.
3. Bersamaan dengan itu menurut banyak pengamat, kapitalisme tidak cukup kompetitif. Motif laba dan perjuangan yang kompetitif bersama dengan teknologi modern, menyebabkan kecenderungan monopoli yang tampaknya melanggar filsafat kapitalisme sesungguhnya. Dalam kecaman ini kaum sosialis dan pendukung ekonomi pasar sejalan, walaupun tidak sependapat dalam hal perbaikan yang tepat.
4. Kapitalisme tidak selalu mempertahankan kesempatan kerja yang tinggi. Artinya terjadinya pengangguran besar-besaran yang merupakan penyakit sosial paling berbahaya yang dihadapi oleh sistem ekonomi. Menurut pengamatan Laski, seorang ilmuwan politik Inggris terkenal: "Sistem produksi Kapitalisme dewasa ini dikecam dari hampir setiap sudut analisis. Sistem ini membuat sebagian dari masyarakat menjadi parasit atas lainnya, dan ia merebut sebagian besar kesempatan untuk hidup pada taraf manusiawi."

Sosialisme: Latar Belakang, Falsafah dan Prinsip-prinsipnya

Sosialisme seperti yang dirumuskan dalam *Encyclopaedia Britannica*, adalah kebijakan atau teori yang bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih baik dengan tindakan otoritas demokratis pusat, dan kepadanya perolehan produksi kekayaan yang lebih baik daripada yang kini berlaku sebagaimana mestinya diarahkan.

Jiwa peraturan sosialis bertolak belakang dengan kapitalisme. Ia bersikap buruk sangka terhadap individu. Kaum sosialis merampas seluruh hak pribadi demi kemaslahatan bersama, dalam hal ini negara. Visi mereka adalah kemaslahatan bersama di atas kemaslahatan individu.⁷

Dalam mencapai tujuannya, faham sosialis bersandar pada kekuasaan, tepatnya kekuasaan negara dan kediktatoran pemimpin. Negara adalah penggerak dan kompas bagi perekonomian rakyat.

⁷ Qardhawi, *Norma dan Etika*, hlm. 70

Individu sama sekali tidak berperan dan tidak mempunyai andil dalam investasi harta negara.

Menurut Taqyuddin An-Nabhani, di antara prinsip-prinsip aliran ini adalah:⁸ (1) Mewujudkan kesamaan (*equality*) secara riil; (2) Menghapus kepemilikan individu (*private property*) secara keseluruhan atau sebagian; dan (3) Mengatur produksi dan distribusi secara lengkap.

Menurut Joad, berbagai tindakan yang dianjurkan sosialisme untuk sosialisasi kehidupan masyarakat adalah:⁹ *Pertama*, Penghapusan milik pribadi atas alat produksi. Hal ini akan digantikan oleh milik pemerintah serta pengawasan atas industri dan pelayanan utama. *Kedua*, sifat dan luasnya industri dan produksi mengabdikan kepada kebutuhan sosial dan bukan pada motif laba. *Ketiga*, dalam kapitalisme daya penggerak adalah laba pribadi. Hal ini akan digantikan oleh motif pelayanan sosial.

Adapun ciri-ciri menonjol dari sistem ekonomi Sosialis adalah:¹⁰ *Pertama*, adanya Perencanaan. Sistem ekonomi kapitalis bersandar pada kebebasan tindakan perseorangan dari jutaan ekonomi pribadi. Tetapi dalam sosialisme, terdapat perencanaan terpusat tentang kehidupan ekonomi negara. Berbagai cabang produksi akan dikembangkan dengan selaras oleh otoritas perencanaan pusat untuk mengabdikan pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. *Kedua*, distribusi Pendapatan. Telah diketahui bahwa distribusi kekayaan dan pendapatan kapitalis sangat tidak merata dan terbatas. Hal ini berbeda dengan sosialis yang membentuk distribusi pendapatan yang lebih merata. Pernyataan ini didasarkan atas kenyataan bahwa hak milik negara atas alat-alat produksi dapat menghapuskan apa yang disebut pendapatan yang diterima tanpa kerja oleh orang-orang swasta. Bunga, sewa dan laba diberikan kepada pemerintah. *Ketiga*, perusahaan Negara. Dalam sosialisme, industri tidak dalam tangan perusahaan perseorangan, tetapi dikendalikan melalui suatu jenis organisasi umum (perusahaan negara).

⁸ Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. Moh. Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 30

⁹ Mannan, *Teori dan Praktik*, hlm. 317

¹⁰ *Ibid*, hlm. 317-319

Kritik terhadap Sosialisme

Di antara beberapa kritikan-kritikan terhadap sistem ekonomi sosialis adalah:¹¹

1. Keputusan suatu otoritas perencanaan pusat akan menjadi sewenang-wenang dan mungkin ekonomi akan menderita karena suatu tingkat akumulasi modal yang keliru.
2. Konon suatu rintangan bagi efisiensi produksi dalam sosialisme terletak dalam kenyataan tidak adanya persaingan, sehingga prinsip seleksi alami dalam industri akan hancur.
3. Masalah penetapan harga dalam sosialisme akan menghadirkan kesulitan besar karena sosialisme akan mencampuri ekonomi alami yang terkandung dalam sistem harga bersaing.
4. Perusahaan kolektif selalu dikaitkan dengan pemborosan yang tidak menentu dan tidak efisien. Karena bila tidak korup, perusahaan kolektif pun akan mati karena birokrasi dan peraturan kaku yang rutin.

Keseimbangan dalam Ekonomi Islam

Jiwa tatanan dalam Islam adalah keseimbangan yang adil. Hal ini terlihat jelas pada sikap Islam terhadap hak individu dan masyarakat. Kedua hak itu diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil (pertengahan) tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati. Ekonomi yang moderat tidak mendzalimi masyarakat khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis. Islam juga tidak mendzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis.¹²

Membuat perbandingan antara ekonomi Islam dan sistem ekonomi lainnya tidaklah semudah yang diperkirakan. Tantangan

¹¹ Ibid, hlm. 320-322

¹² Qardhawi, *Norma dan Etika*, hlm. 71; Menurut Kuntowijoyo, Sistem Ekonomi Islam berangkat dari kesadaran tentang etika, sebuah *ethical economy*, sedangkan sistem ekonomi lain, baik kapitalisme maupun sosialisme, berangkat dari kepentingan (*interest*). Kapitalisme berangkat dari kepentingan perorangan (*selfishness*) dan sosialisme berangkat dari kepentingan kolektif (*collectivism*). Dengan ekonomi berdasar etika itu agama tidak menjadi alat bagi suatu kepentingan. Tugas umat ialah memikirkan bahwa agamanya menghendaki sebuah *ethical economy* tetapi tetap tanggap kepada kepentingan-kepentingan yang nyata. Lihat, Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 135-136

zaman yang dihadapi Islam dewasa ini menunjukkan kepada kita perlunya suatu analisis yang dapat menunjukkan di mana Islam lebih unggul daripada yang lainnya dalam memenuhi tujuan tertentu.

Kapitalisme percaya pada hak milik pribadi yang tak terbatas atas alat-alat produksi. Semboyannya adalah "Segala sesuatu untuk diri sendiri, peduli apa dengan orang lain". Sementara sosialisme berusaha melenyapkan hak milik pribadi atas alat-alat produksi. Konsep laba pribadi seperti dalam kapitalisme akan digantikan oleh motif pelayanan sosial.¹³

Islam meletakkan ekonomi pada posisi tengah dan keseimbangan yang adil dalam bidang ekonomi. Keseimbangan diterapkan dalam segala segi, imbang antara modal dan usaha, antara produksi dan konsumsi, antara produsen dan konsumen dan antara golongan-golongan dalam masyarakat.

Islam bertujuan untuk mencapai suatu sistem sosial yang bernafaskan keadilan dan kesejahteraan bagi ummatnya.¹⁴ Salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam yaitu tidak dikenalnya istilah "bunga uang" dalam seluruh praktik kehidupan ekonominya.¹⁵

Ada beberapa prinsip dalam ekonomi Islam yang menjadikannya berbeda dengan sistem ekonomi lainnya seperti diuraikan berikut ini:¹⁶

1. Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia, sebagai orang yang dipercayai-Nya. Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam memproduksi guna memenuhi kesejahteraan secara bersama di dunia yaitu untuk diri sendiri dan orang lain, dan terpenting kegiatan tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Konsep ini berimplikasi penting tentang pemilikan aset atau alat produksi. Karena itu,

¹³ Mannan, *Teori dan Praktik*, hlm. 332-333

¹⁴ Ekonomi Islam pada hakikatnya adalah suatu upaya untuk memformulasikan suatu ilmu ekonomi yang berorientasi kepada manusia dan masyarakat yang tidak mengakui individualisme yang berlebih-lebihan dalam ekonomi klasik. Lihat Ikhwan Abidin Basri, "Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Islam Muamalatuna*, no.1 vol. I (2001), hlm. 6

¹⁵ Karnaen A. Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Depok Timur: Usaha Kami, 1996), hlm. 39

¹⁶ M. M. Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Bangkit Daya Insani, 1995), hlm. 3-6

- aktivitas ekonomi seorang muslim digerakkan oleh motivasi impersonal dalam rangka memenuhi tanggung jawabnya sebagai manusia yang beriman. Jadi prinsip ekonomi Islam adalah amat berbeda dengan prinsip ekonomi kapitalis yang mendasarkan pada kepentingan diri sendiri (*self interest principle*).
2. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi atau faktor produksi. Akan tetapi hak kepemilikan individu tidak mutlak dan bersyarat. *Pertama*, kepemilikan individu dalam Islam dibatasi oleh kepentingan masyarakat. Jika negara menginginkan suatu aset tertentu, maka pemilik aset tersebut harus melepaskannya. Hal ini merupakan salah satu prinsip yang terkandung dalam syari'ah yang menyebutkan kepentingan individu harus dinomor duakan dibandingkan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Jadi bila kepentingan individu bertentangan dengan negara yang mewakili masyarakat secara keseluruhan, maka individu harus memberikan aset tersebut kepada negara. *Kedua*, Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh dari suap, kecurangan dan penipuan, pencurian, perampokan, pelacuran, produksi dan penjualan minuman alkohol, bunga, judi, perdagangan gelap, usaha yang menghancurkan masyarakat. Juga tidak diizinkan menahan barang untuk meningkatkan harga. Oleh karena itu, tidak seorang pun dapat dibenarkan memperoleh pendapatan dari aktivitas yang telah disebutkan di atas.
 3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama, ini berbeda sekali dengan sistem pasar bebas dalam mencapai tingkat keseimbangan di berbagai bidang. Seorang muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, harus berpegang atas tuntunan al-Qur'an: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka di antara kamu...*" (QS. 4: 29). Kerjasama merupakan spirit Islam untuk memuaskan pembeli dan penjual barang, jasa atau faktor produksi. Kegiatan kerjasama ini dapat melalui koperasi perusahaan, koperasi pembelian dan penjualan atau pembelian dan penjualan secara individu tapi menggunakan prinsip koperasi sebagai petunjuk untuk pembelian dan penjualan. Jiwa dari kerjasama ini adalah mencari keuntungan

- yang wajar, dan tanpa perubahan ongkos maka tingginya harga barang hanya sebagai akibat dari prinsip kelangkaannya.
4. Peranan pemilikan kekayaan/aset dalam ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi lainnya. Kepuasan murni yang diperoleh dari penguasaan kekayaan pribadi, dalam sistem ekonomi lainnya akan menghasilkan manusia yang mementingkan diri sendiri. Sedangkan dalam Islam kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep pemilikan ini yang berlawanan dengan sistem kapitalis. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang.¹⁷
 5. Dalam ekonomi penganut pasar bebas, pemilikan industri didominasi oleh monopoli dan oligopoli, tidak terkecuali industri tersebut amat penting untuk umum. Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Prinsip tersebut didasari hadits nabi: *"Masyarakat punya hak yang sama atas air, padang rumput dan api."* Hadits ini menghendaki semua industri ekstraktif yang ada hubungannya dengan produksi air, bahan tambang, bahkan bahan makanan harus dikelola oleh perusahaan negara. Demikian juga, berbagai macam bahan bakar untuk keperluan dalam negeri dan industri tidak diperkenankan dikuasai oleh perusahaan individu.
 6. Seorang muslim harus meyakini bahwa keseluruhan aktifitasnya di dunia ini akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Oleh karena itu, Islam mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, perlakuan tidak adil, semua bentuk diskriminasi dan penindasan. Jadi berdasarkan aksioma agama, seseorang bisa mengarahkan ke mana arah dan muara perilakunya.

Yang jelas, bahwa seluruh aktivitas perekonomian dalam Islam selalu mengedepankan kemaslahatan dan penuh rasa keadilan

¹⁷ Prinsip tersebut digambarkan di dalam al-Qur'an: *"Apa yang diberikan Allah (sebagai harta rampasan perang) pada Rasul-Nya berasal dari penduduk kota-kota adalah untuk Allah dan untuk Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..."* (QS. Al-Hasyr (59): 7).

bagi seluruh pelaku ekonomi, di mana al-Qur'ân dan sunnah sebagai landasan berfikirnya.

Ekonomi Islam: Perbedaan Sudut Pandang

Sejauh ini, kita telah mengetahui perbedaan-perbedaan yang diametral antara paradigma yang mendasari ekonomi konvensional dengan paradigma yang mendasari ekonomi Islam. Keduanya tidak mungkin dan tidak akan pernah dapat dikompromikan, karena masing-masing didasarkan atas pandangan dunia (*weltanschauung*) yang berbeda. Ekonomi konvensional melihat ilmu sebagai sesuatu yang sekuler (berorientasi hanya pada kehidupan duniawi), dan sama sekali tidak memasukkan Tuhan serta tanggung jawab manusia kepada Tuhan di akhirat dalam bangun berpikrnya. Karena itu, ilmu ekonomi konvensional menjadi bebas nilai (positivistik). Sementara itu, ekonomi Islam dibangun (diwarnai) oleh prinsip-prinsip religius (berorientasi pada kehidupan dunia, sekaligus kehidupan akhirat).

Tujuan ekonomi Islam, menurut M. Umer Chapra, sejalan dengan tujuan pokok Islam yaitu menciptakan kesejahteraan bagi semua umat manusia. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan, yang hal ini dapat diperoleh melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas individu. Pemenuhan kebutuhan rohani membutuhkan pembangunan moral dan pemenuhan kebutuhan materi dapat direalisasikan dengan pembangunan umat manusia dan sumber daya yang ada dalam suatu pola yang merata sehingga semua kebutuhan manusia, dapat dipenuhi secara utuh dan terwujud suatu distribusi kekayaan yang adil dan merata.¹⁸

Dalam tataran paradigma seperti di atas, para ekonom Muslim tidak menghadapi masalah perbedaan pendapat yang berarti. Namun, ketika mereka diminta untuk menjelaskan apa dan bagaimana konsep ekonomi Islam itu, mulai muncullah perbedaan pendapat. Sampai saat ini, pemikiran para ekonom Muslim kontemporer dapat diklasifikasikan setidaknya menjadi tiga Madzhab sebagaimana akan dijelaskan berikut:

¹⁸ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Tazkia Institut dan GIP, 2000), hlm. 7-8

1. Madzhab Bagir al-Sadr

Madzhab ini dipelopori oleh Baqir as-Sadr dengan bukunya yang fenomenal *Iqtishādunâ* (Ekonomi Kita).¹⁹ Madzhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi (*economics*) tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi, dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak akan pernah dapat disatukan, karena keduanya berasal dari filosofi yang saling kontradiktif. Yang satu anti-Islam, yang lainnya Islam.²⁰

Menurut mereka, perbedaan filosofi ini berdampak pada perbedaan cara pandang keduanya dalam melihat ekonomi. Menurut ilmu ekonomi, masalah ekonomi muncul karena adanya keinginan manusia yang tidak terbatas sementara sumber daya yang tersedia untuk memuaskan keinginan manusia tersebut jumlahnya terbatas. Madzhab Baqir menolak pernyataan ini, karena menurut mereka, Islam tidak mengenal adanya sumber daya yang terbatas. Dalil yang dipakai adalah QS. al-Qamar (54): 49: “*Sungguh telah Kami ciptakan segala sesuatu dalam ukuran yang setepat-tepatnya.*” Dengan demikian, karena segala sesuatu telah terukur dengan sempurna, sebenarnya Allah telah memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia di dunia. Maka tergantung manusianya yang akan mengolah, memanfaatkan dan mengoptimalkan kesempurnaan sumber daya yang ada di dunia ini.²¹

Pendapat bahwa keinginan manusia itu tidak terbatas juga ditolak. Suatu contoh adalah manusia akan berhenti minum jika dahaganya sudah terpuaskan. Oleh karena itu, mazhab ini berkesimpulan bahwa keinginan yang tidak terbatas itu tidak

¹⁹ Muhammad Bagir al-Sadr, *Iqtishādunâ (Our Economics) Discovery Attempt on Economic Doctrine in Islam*, (Teheran: WOFIS, 1983 M./1403 H). Selain Bagir al-Sadr, tokoh madzhab ini di antaranya adalah Abbas Mirakhor, Bagir al-Hasani, Kadim al-Sadr, Iraj Toutouchian, Hidayati, dan lain-lain.

²⁰ Bagir al-Hasani memberikan sepuluh argumen untuk memperkuat pendapat ini. Lihat Bagir al-Hasani, “The Concept of Iqtishad”, dalam Bagir al-Hasani and Abbas Mirakhor, *Essays on Iqtishad, The Islamic Approach to Economic Problems*, (Silver Spring USA: NUR, 1989/1440 H.), hlm. 21-23,

²¹ Adiwarmam Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2003), hlm. 47

dapat dibenarkan karena kenyataannya keinginan manusia itu terbatas. Bandingkan pendapat ini dengan teori *Marginal Utility*, *Law of Diminishing Returns*, dan *Hukum Gossen* dalam ilmu ekonomi.²²

Madzhab Baqir juga berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil sebagai akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat kaya, sementara yang lemah tidak memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat miskin. Karena itu masalah ekonomi muncul bukan karena sumber manusia yang terbatas. Tetapi karena keserakahan manusia yang tidak terbatas.²³

Karena menurut mereka, istilah "ekonomi Islami" adalah istilah yang bukan hanya tidak sesuai dan salah, tapi juga menyesatkan dan kontradiktif, karena itu penggunaan istilah "ekonomi Islami" harus dihentikan.²⁴ Sebagai gantinya, ditawarkan istilah baru yang berasal dari filosofi Islam, yakni *Iqtishād*. Menurut mereka, *iqtishād* bukan sekedar terjemahan dari ekonomi. *Iqtishād* berasal dari bahasa Arab *qasd* yang secara harfiah berarti "*equilibrium*" atau "keadaan sama, seimbang atau pertengahan".²⁵

2. Madzhab *Mainstream*

²² Ibid.

²³ al-Hasani, "The Concept of *Iqtishad*" hlm. 21-22

²⁴ Ibid., hlm. 23. Menurut Bagir al-Sadr, dalam bukunya *Islam dan Madzhab Ekonomi*, setelah mengukuhkan adanya sistem (dia menggunakan istilah "madzhab") ekonomi dalam Islam, membuat perbedaan yang jelas antara madzhab dan ilmu. Madzhab ekonomi menetapkan kebijakan pengaturan kehidupan ekonomi berdasarkan konsep tentang keadilan, tetapi ilmu ekonomi tidak menentukan suatu kebijakan, hanya mengkaji efek-efek kebijakan yang telah diterapkan dalam masyarakat. Misalnya, ilmu ekonomi dapat mempelajari secara empiris jaringan suatu bank dalam sistem ekonomi Kapitalis atau sistem ekonomi Sosialis atau sistem ekonomi Islam. Lihat, Muhammad Bagir Sadr, *Islam dan Madzhab Ekonomi*, (Jakarta: Penerbit YAPI, 1989).

²⁵ Dalam Bahasa Arab, istilah ekonomi, berasal dari kata benda yang diambil dari akar kata *iqtashada – yaqtashidu – iqtishadan*, yang memiliki makna seimbang (*equilibrium*) atau kondisi seimbang. Ibid., hlm. 24

Madzhab *Mainstream* berbeda pendapat dengan madzhab Bagir. Madzhab ini justru setuju bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Misalnya, bahwa total permintaan dan penawaran beras di seluruh dunia berada pada titik *equilibrium*. Namun, jika kita berbicara pada tempat dan waktu tertentu, maka mungkin terjadi kelangkaan sumber daya. Bahkan ini yang sering terjadi. Suplai beras di Ethiopia dan Bangladesh, misalnya, tentu lebih langka dibandingkan di Thailand. Jadi, keterbatasan sumber daya memang ada, dan diakui pula oleh Islam. Dalil yang dipakai adalah QS. al-Baqarah (2): 155:

ولنبلوّكم بشيءٍ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشّر الصّابرين
(البقرة: ١٥٥)

“Dan sungguh akan kami uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira bagi orang-orang yang sabar.”

Sedangkan keinginan manusia yang tidak terbatas dianggap sebagai hal yang alamiah. Dengan merujuk kepada Firman Allah swt surat al-Takatsur (102): 1-5

ألهكم التكاثر (١) حتّى زرتم المقابر (٢) كلا سوف تعلمون (٣) ثمّ كلا سوف تعلمون
(٤) كلا لو تعلمون علم اليقين (٥)

“Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Sampai kamu masuk ke liang kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu).”²⁶

Dengan demikian, pandangan madzhab ini tentang masalah ekonomi hampir tidak ada bedanya dengan pandangan ekonomi konvensional. Kelangkaan sumber dayalah yang menjadi penyebab munculnya masalah ekonomi. Bila demikian, di

²⁶ Ayat tersebut sejalan dengan sabda Nabi Muhammad saw. bahwa manusia tidak akan pernah puas. Bila diberikan emas satu lembah, ia akan meminta emas dua lembah. Bila diberikan dua lembah, ia akan meminta tiga lembah, dan begitu seterusnya sampai ia masuk ke liang kubur.

manakah letak perbedaan madzhab *Mainstream* ini dengan ekonomi konvensional?

Perbedaannya terletak dalam cara menyelesaikan masalah tersebut. Dilema sumber daya yang terbatas *versus* keinginan yang tak terbatas memaksa manusia untuk melakukan pilihan-pilihan atas keinginannya. Kemudian manusia membuat skala prioritas pemenuhan keinginan, dari yang paling penting sampai kepada yang paling tidak penting. Dalam ekonomi konvensional, pilihan dan penentuan skala prioritas dilakukan berdasarkan selera pribadi masing-masing. Manusia boleh mempertimbangkan tuntutan agama, boleh juga mengabaikannya. Hal demikian dalam bahasa al-Qur'an disebut: "pilihan dilakukan dengan mempertaruhkan hawa nafsunya". Tetapi dalam ekonomi Islam, keputusan pilihan ini tidak dapat dilakukan semaunya saja. Prilaku manusia dalam setiap aspek kehidupannya – termasuk ekonomi – selalu dipandu oleh Allah lewat al-Qur'an dan al-Sunnah.²⁷

Di antara tokoh mazhab ini adalah M. Umer Chapra, yang mengatakan bahwa usaha mengembangkan ekonomi Islam bukan berarti memusnahkan semua hasil analisis yang baik dan sangat berharga yang telah dicapai oleh ekonomi konvensional selama lebih dari seratus tahun terakhir. Mengadopsi hal-hal yang baik dan bermanfaat yang dihasilkan oleh bangsa dan budaya non-Islam sama sekali tidak dilarang oleh agama. Nabi bersabda bahwa hikmah/ilmu itu bagi umat Islam adalah ibarat barang yang hilang. Di mana saja ditemukan, maka umat Muslimlah yang paling berhak mengambilnya. Catatan sejarah umat Muslim memperkuat hal ini, para ulama dan ilmuwan Muslim banyak mengadopsi dari peradaban lain seperti Yunani, India, Persia, Cina dan lain-lain. Yang bermanfaat diambil, yang tidak bermanfaat dibuang, sehingga terjadi transformasi ilmu dengan diterangi cahaya Islam,²⁸ meminjam istilah Naquib Al-Attas, Islamisasi Ilmu Pengetahuan.

²⁷ M. Abdul Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice*, (Lahore: SH Muhammad Ashraf, 1970), hlm. 3-4

²⁸ Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, hlm. 50

3. Madzhab Alternatif Kritis

Madzhab ini mengkritik kedua madzhab sebelumnya. Madzhab Bagir dikritik sebagai madzhab yang berusaha untuk menemukan sesuatu yang baru yang sebenarnya sudah ditemukan oleh orang lain. Menghancurkan teori lama, kemudian menggantinya dengan teori baru. Sementara madzhab *Mainstream* dikritiknya sebagai jiplakan dari ekonomi neo klasik dengan menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat serta niat.

Madzhab ini adalah sebuah madzhab yang kritis. Mereka berpendapat bahwa analisis kritis bukan saja harus dilakukan terhadap sosialisme dan kapitalisme, tetapi juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Mereka yakin bahwa Islam pasti benar, tetapi ekonomi Islami belum tentu benar, karena ekonomi Islami adalah hasil tafsiran manusia terhadap al-Qur'ân dan al-Sunnah, sehingga nilai kebenarannya tidak mutlak. Proposisi dan teori yang diajukan oleh ekonomi Islam harus selalu diuji kebenarannya sebagaimana yang dilakukan terhadap ekonomi konvensional.²⁹

Walaupun pemikiran para pakar tentang ekonomi Islam terbagi ke dalam tiga mazhab di atas, namun pada dasarnya mereka setuju dengan prinsip-prinsip umum yang mendasarinya. Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni: *tawhid* (keimanan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khalifah* (pemerintahan), dan *ma'ad* (hasil). Kelima nilai inilah menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam.³⁰

Namun demikian, teori yang kuat dan baik tanpa diaplikasikan menjadi sistem, akan menjadikan ekonomi Islam hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa memberikan dampak pada kehidupan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dari kelima nilai-nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islam. Ketiga prinsip derivatif itu adalah *multitype ownership*, *freedom to act*, dan *social justice*. Di atas semua nilai

²⁹ Jomo K.S., *Islamic Economic Alternatives, Critical and Perspectives and Directins*, (Kuala Lumpur: Iqra, 1993), hlm. 12

³⁰ Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, hlm. 52

dan prinsip inilah dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya, yakni konsep akhlak. Akhlak menempati posisi sentral, karena akhlak inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwan para Nabi, yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan segala aktivitasnya.³¹

Solusi Islam tentang Masalah-masalah Ekonomi

Dalam memecahkan persoalan-persoalan di atas, ada satu sisi fundamental dalam Islam, *pertama* yaitu hukum-hukum Alam dan prinsip-prinsip kehidupan yang menyatu dalam sifat manusia tidak boleh dirusak, dan kapan pun terjadi penyimpangan dari jalan yang telah ditetapkan, maka ia harus diarahkan kembali ke jalan yang benar. *Prinsip kedua* yang dibawakan Islam untuk menjadi dasar pembaharuan sosial adalah: diperkenalkannya beberapa peraturan eksternal dalam sistem sosial itu saja tidak cukup; sebaliknya, tekanan yang jauh lebih besar harus diberikan pada reformasi moral dan diciptakannya sikap moral yang benar di kalangan umat manusia. Sehingga kejahatan dalam pikiran manusia harus ditindas dari akarnya. *Prinsip dasar ketiga*, yang dapat diikuti dalam seluruh sistem Islam adalah kewenangan dan kekuasaan *kursif* serta penekanan hukum dari pemerintah tidak boleh digunakan kecuali terpaksa.³²

³¹ Ibid., hlm. 52-53

³² Berpegang pada ketiga prinsip tersebut, Islam mengakui semua prinsip dasar tentang sisi kehidupan ekonomi yang merupakan fondasi ekonomi manusia. Islam juga menghapuskan, tidak hanya bergantung pada kekuasaan *kursif* negara, tetapi seluruh instruksi moral secara maksimum serta sejumlah kecil kekuatan eksternal, dan prinsip-prinsip yang salah yang dianut manusia ketika ia jatuh menjadi korban hawa nafsu setan. Prinsip bahwa manusia harus bebas bekerja keras demi nafkah hidupnya, dan ia harus menjaga hak miliknya berupa apa pun yang diperolehnya sendiri, serta bahwa perbedaan pasti timbul di antara manusia sesuai dengan keragaman kemampuan dan keadaan mereka, telah diakui oleh Islam sejauh hal itu sesuai dengan Hukum Alam. Islam kemudian mencoba untuk mengubah prinsip ini dan memperkenalkan batasan-batasan tertentu, terhadap amalan nyata dengan tujuan agar ia tidak disalahgunakan dan dijadikan alat untuk memeras dan menindas masyarakat yang lemah. Lihat, Afzalurrahman, *Muhammad sebagai Seorang Pedagang (Muhammad as A Trader)*, terj. Dewi Nurjulianti *et al*, (Jakarta: Penerbit yayasan Swarna Bumi, 1997), hlm. 43-44

Jadi, dalam sistem ekonomi Islam, individu tidak mungkin menjadi pemeliharaan kekayaan nasional negara, juga mustahil mereka semua dibawa dengan cara paksa ke tingkat ekonomi yang sama. Tetapi syarat-syarat ditetapkan, di mana setiap individu dapat memperoleh kekayaan yang cukup untuk memenuhi keperlunya dengan jalan yang terbaik dan mungkin, tanpa membahayakan kawan-kawan kerjanya. Ia membelanjakan pendapatan yang telah diperolehnya secara ekonomis tanpa mengganggu keseimbangan ekonomi masyarakat. Selain itu, tidaklah mungkin bagi individu untuk mengeruk kekayaan yang terlalu banyak dengan jalan memeras, sementara mayoritas penduduk hidup dengan sarana kehidupan yang sangat sederhana.³³

Di samping adanya beberapa aliran sistem ekonomi, sebagaimana penjelasan di atas, ada dua pandangan ekstrim dalam perekonomian, yaitu: *Pertama*, asketisisme. pandangan aliran ini adalah menekankan aspek-aspek spiritual dan moral serta menolak sepenuhnya aspek-aspek kehidupan material manusia. penganut aliran ini menganggap bahwa semua aktivitas ekonomi adalah perbuatan jahat, dan perjuangan ekonomi adalah perbuatan yang penuh dosa.

Kedua, materialisme. kaum materialis sebaliknya, sangat menekankan aspek material. Usaha-usaha manusia dibatasi sepenuhnya pada pencapaian hasil-hasil material, sementara aspek-aspek moral ditolak. Mereka hanya sedikit atau tidak menghargai rasa persaudaraan dan kasih sayang manusia. Seluruhnya penekanannya diletakkan pada pemanfaatan ekonomi. Penganut aliran ini menghalalkan segala cara, benar atau salah, untuk memperoleh harta benda dan menganggap yang hanyalah yang bekerja.³⁴

Islam menarik benang merah di antara pandangan-pandangan ekstrim di atas, dan mencoba menciptakan sebuah keseimbangan yang nyata di antara keduanya. Islam menekankan bahwa keberhasilan tidaklah terdapat pada pandangan aliran yang pertama atau yang kedua, tetapi pada keharmonisan keduanya.

³³Ibid., hlm. 50

³⁴Ibid.

Orang hendaknya tidak hanya berorientasi pada spiritualisme dan menolak cara-cara hidup material, namun ia juga tidak memperhitungkan segala sesuatu berdasarkan manfaat ekonomi semata tanpa mengindahkan nilai-nilai moral sama sekali.³⁵

Jadi, yang coba dilakukan Islam adalah menciptakan suatu keharmonisan antara kehidupan spiritual dan moral manusia; Islam mengajarkan manusia bahwa keberhasilan dan keselamatan bukanlah ada pada paham *asketisme* dan *materialisme*, tetapi pada gabungan yang harmonis antara keduanya. Ia tekankan bahwa manusia tidak boleh menjerumuskan dirinya seperti pada ruh *asketisme*, yang tidak menghargai kepentingan materi dan menganggapnya sebagai suatu dosa besar. Juga ia tidak boleh berpegang pada ekstrim lainnya dan mempertimbangkan segala sesuatu dengan melulu melihat hasil-hasil materinya serta tidak memperhatikan nilai-nilai moral kehidupan.

Penutup

Sistem ekonomi Islam pada dasarnya berbeda dengan kapitalisme dan sosialisme. Tetapi dalam beberapa hal merupakan kompromi antara kedua aliran tersebut, dan berdiri di antara keduanya. Islam memandang persoalan ekonomi tidak dari perspektif kapitalis, yang memberikan kebebasan dan hak pemilikan tak terbatas pada setiap individu serta mendukung eksploitasi seseorang. Juga tidak memandang dari perspektif sosialis, yang ingin merampas semua hak individu dan menjadikan individu semata-mata sebagai budak ekonomi yang dikendalikan negara; tetapi ia memberi perhatian pada naluri ke egoisan manusia tanpa membiarkannya menjadi berbahaya bagi masyarakat. Rekonsiliasi antara kepentingan diri sendiri dan anggota masyarakat dicapai melalui tindakan-tindakan hukum dan moral.

Islam meletakkan ekonomi pada posisi tengah dan keseimbangan yang adil dalam bidang ekonomi. Keseimbangan diterapkan dalam segala segi, imbang antara modal dan usaha, antara produksi dan konsumsi, antara produsen dan konsumen dan antara golongan-golongan dalam masyarakat. Essensinya, bahwa seluruh aktivitas perekonomian dalam Islam selalu mengedepankan

³⁵Ibid., hlm. 50-51

kemaslahatan dan penuh rasa keadilan bagi seluruh pelaku ekonomi, di mana al-Qur'ân dan sunnah sebagai landasan berfikirnya. *Wallâh a`lam bi al-shawâb.*

Daftar Pustaka:

- Afzalurrahman. *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang (Muhammad as A Trader)*, terj. Dewi Nurjulianti et al. Jakarta: Penerbit yayasan Swarna Bumy, 1997
- Basri, Ikhwan Abidin. "Ekonomi Islam". *Jurnal Ekonomi Islam Muamalatuna*, No.1 Vol. I (2001)
- Chapra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Tazkia Institut dan GIP, 2000
- . *Islam and Economic Development*. Islamabad: The International Institute of Islamic Thought, 1993
- . *The Future of Economic: An Islamic Perspective*, terj. Amdiar Amir, et al. Jakarta: Syariah Economic and Banking Institute, 2001
- Hasani, Bagir al- & Mirakhor, Abbas. *Essays on Iqtishad, The Islamic Approach to Economic Problems*. Silver Spring USA: NUR, 1989/1440 H.
- Jomo, K.S., *Islamic Economic Alternatives, Critical and Perspectives and Directins*. Kuala Lumpur: Iqrak, 1993
- Kuntowijoyo. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan, 1997
- Mannan, Muhammad Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993
- . *Islamic Economics: Theory and Practice*, Lahore: SH Muhammad Ashraf, 1970
- Metwally, M.M. *Teori dan Model Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Bangkit Daya Insani, 1995
- Nabhani, Taqiyuddin an-. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. Moh. Maghfur Wachid. Surabaya: Risalah Gusti, 1996

- Perwataatmadja, Karnaen A. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. Depok Timur: Usaha Kami, 1996
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- Sadr, Muhammad Bagir al-. *Islam dan Madzhab Ekonomi*. Jakarta: Penerbit YAPI, 1989
- . *Iqtishaduna (Our Economics) Discovery Attempt on Economic Doctrine in Islam* Teheran: WOFIS, 1983 M./1403 H.